

BUPATI BANYUMAS HARAP REVITALISASI PASAR RAKYAT DONGKRAK EKONOMI-PENDAPATAN ASLI DAERAH



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/04/18/prasasti.jpg.webp>

Isi Berita:

Purwokerto (ANTARA) - Penjabat (Pj) Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro mengharapkan revitalisasi pasar rakyat di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yaitu Pasar Wage dan Pasar Situmpur, meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi pasar.

"Ini revitalisasi (Pasar Wage) pasca-kebakaran, Alhamdulillah sudah selesai dengan nilai kontrak Rp9 miliar lebih, sedangkan Pasar Situmpur itu nilai kontraknya hampir Rp800 juta, alhamdulillah sudah jadi," kata Pj Bupati usai peresmian revitalisasi Pasar Wage Tahap I dan Pasar Situmpur yang dipusatkan di Pasar Wage, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis.

Dalam hal ini, kata dia, revitalisasi Pasar Wage dilakukan setelah pasar rakyat terbesar di Purwokerto itu mengalami kebakaran pada tahun 2021.

Sementara revitalisasi Pasar Situmpur dilakukan karena kondisi pasar tersebut sudah tidak layak dan terkesan kumuh.

Ia mengharapkan revitalisasi dua pasar rakyat tersebut dapat dinikmati masyarakat dan tetap dijaga kebersihannya termasuk dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Ini supaya bisa meningkatkan ekonomi, masyarakat yang berbelanja juga senang, dan pendapatan pedagang semakin meningkat," katanya.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Banyumas terus berupaya memperbaiki pasar-pasar rakyat lainnya yang kondisinya memprihatinkan.

Terkait dengan hal itu, dia mengatakan pihaknya pada hari Senin (22/4) akan membahas rencana revitalisasi pasar-pasar rakyat di Kabupaten Banyumas.

"Akan kita rembuk besok hari Senin (22/4), prioritasnya mana yang harus segera kita perbaiki di perubahan anggaran. Kita memang di perubahan anggaran akan bicara soal infrastruktur terutama di daerah perkotaan dan beberapa pasar yang akan kita perbaiki," katanya menegaskan.

Disinggung mengenai revitalisasi Pasar Wage Tahap II, Pj Bupati mengatakan hal itu tergantung pada ketersediaan anggaran.

Kendati demikian, dia mengharapkan revitalisasi Pasar Wage Tahap II dapat dilaksanakan pada tahun 2025.

"Ini 'kan baru menyusun perubahan dan APBD Murni Tahun 2025. Mudah-mudahan nanti bisa meningkat dan itu bisa kita alokasikan," katanya.

Terkait dengan pembuatan lapak yang akan ditempati pedagang di lokasi revitalisasi Pasar Wage Tahap I, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Kabupaten Banyumas Titik Pujiastuti mengatakan saat sekarang masih dalam proses tender dan rencana pengumuman pemenang pada bulan Mei 2024.

Menurut dia, anggaran pembuatan lapak pedagang tersebut sebesar Rp2 miliar dan diharapkan dapat selesai pada pertengahan tahun 2024.

"Oleh karena itu, penempatan pedagang masih menunggu selesainya pembuatan lapak yang sampai saat ini masih dalam proses tender," katanya.

Ia mengharapkan dengan adanya revitalisasi Pasar Wage dan Pasar Situmpur dapat memperlancar aktivitas perdagangan dan meningkatkan perekonomian rakyat serta meningkatkan PAD melalui retribusi pasar.

Salah seorang pedagang, Karsito (44) mengaku bersyukur revitalisasi Pasar Wage setelah kebakaran tersebut telah selesai meskipun belum bisa ditempati karena masih menunggu selesainya pembuatan lapak.

"Sementara ini, saya berjualan di tepi jalan luar pasar," kata pedagang tahu itu. (Sumarwoto)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/530427/bupati-banyumas-harap-revitalisasi-pasar-rakyat-dongkrak-ekonomi-pad>, "Bupati Banyumas Harap Revitalisasi Pasar Rakyat Dongkrak Ekonomi-PAD", tanggal 18 April 2024.
2. <https://www.linklr.net/trends/bupati-banyumas-harap-revitalisasi-pasar-rakyat-dongkrak-ekonomi-pad>, "Bupati Banyumas Harap Revitalisasi Pasar Rakyat Dongkrak Ekonomi-PAD", tanggal 18 April 2024.
3. <https://banyumas.suaramerdeka.com/ekonomi/0912453272/revitalisasi-pasar-di-banyumas-diharapkan-meningkatkan-perekonomian-rakyat>, "Revitalisasi Pasar di Banyumas Diharapkan Meningkatkan Perekonomian Rakyat", tanggal 18 April 2024.

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05